

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Teknologi informasi kini sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap organisasi dalam menjalankan setiap aspek operasionalnya. Saat ini penerapan teknologi informasi tidak hanya digunakan pada sektor bisnis saja, namun juga pada sektor publik untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat (Simarmata dkk., 2020). Salah satu konsep pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam sektor pemerintahan sebagai bentuk pengelolaan dan peningkatan pelayanan publik disebut dengan sistem e-Government atau e-Government (SPBE) (Sudarsono & Lestari, 2018). Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan badan pengatur pemerintah yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna (Sistem pemerintahan berbasis elektronik, 2018). Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk menciptakan jaringan informasi pelayanan publik, menjalin hubungan interaktif untuk meningkatkan perekonomian nasional, menjalin hubungan, dan menjalin hubungan dengan sejumlah organisasi publik, serta membentuk sistem pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemantauan dan evaluasi SPBE pada instansi pemerintah telah diatur oleh Menteri Sekretaris Negara. Peraturan PAN dan Rb Nomor 59 Tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi SPBE, menjadi tolak ukur untuk mengukur tingkat kematangan dan kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan spbe pada instansi pemerintah berupa harga, nilai kinerja indeks SPBE (Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara, t.t.-a).

Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berlaku di tingkat nasional, pada instansi pusat dan daerah, dengan tujuan untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif, transparansi dan akuntabilitas, serta terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan dapat diandalkan (Presiden republik indonesia-2, t.t.). Melalui

Peraturan Sekretaris PANRB tentang Pedoman Evaluasi Sistem E-Government disebutkan bahwa untuk mencapai pelaksanaan SPBE di setiap pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan tujuannya, maka harus dilakukan penilaian secara berkala.

Hasil evaluasi pelaksanaan SPBE pada tahun 2022 oleh Kemen PANRB, Pemerintah Daerah Kota Cimahi mendapat nilai indeks SPBE 3,09 dengan predikat SPBE yaitu baik

(INDEKS\_SPBE\_Kepmen\_Nomor\_108\_Tahun\_2023\_Tentang\_Hasil\_Tauval\_Tahun (1), t.t.). Sesuai dengan Perpres No. 95 tahun 2018 tentang SPBE untuk mewujudkan tata kelola SPBE yang terpadu antara instansi pusat dan instansi daerah perlu adanya transformasi mendasar pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan SPBE. Meski Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dikeluarkan untuk mendorong penerapan SPBE di tingkat nasional, namun hasil evaluasi Kementerian PANRB tahun 2022 menunjukkan bahwa Pemda Kota Cimahi masih perlu untuk mengoptimalkan pada layanan publik dan juga administrasi pemerintahan yang baik. Perbaikan tersebut memerlukan optimalisasi, standarisasi teknologi informasi, mengingat kondisi pelayanan publik di Kota Cimahi saat ini cenderung belum terintegrasi dan masih sebagian dipisahkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas integrasi proses. Diperlukan langkah konkrit untuk meningkatkan koordinasi dan tata kelola SPBE agar pelayanan publik dapat lebih terintegrasi di Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan menjadi lebih efisien.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian tugas akhir ini difokuskan kepada Dinas Arsip Daerah sebagai objek penelitian dan lebih difokuskan lagi ke bagian Fungsi Kearsipan. Pada Fungsi Kearsipan, terdapat permasalahan layanan arsip statis saat ini belum optimal, terutama dalam menyediakan akses virtual bagi publik. Layanan ini penting agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses arsip di Kota Cimahi secara online, tanpa perlu datang langsung. Optimalisasi dapat dilakukan melalui pengembangan platform digital yang mudah digunakan. Selain itu, diperlukan edukasi kepada publik mengenai cara penggunaan layanan ini. Dengan layanan yang lebih optimal, diharapkan akses arsip oleh masyarakat menjadi lebih cepat dan

mudah, guna mendukung transparansi dan pelestarian budaya di Kota Cimahi. Sebagai hasilnya, penelitian ini akan berfokus pada pengembangan *enterprise architecture* dengan menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM, yang didasarkan pada Perpres No.132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional untuk Fungsi Kearsipan. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan rancangan/ *blueprint* arsitektur SPBE yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan integrasi layanan publik serta administrasi pemerintahan antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Pemerintah Kota Cimahi.

### **I.2. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah yang mendasari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kondisi arsitektur SPBE saat ini yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada Fungsi Kearsipan?
- b. Bagaimana perancangan arsitektur SPBE yang ditargetkan untuk Fungsi Kearsipan Kota Cimahi dengan menerapkan TOGAF ADM, sesuai dengan panduan Arsitektur SPBE dalam Perpres No. 132 Tahun 2022?

### **I.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menilai dan menganalisis kondisi arsitektur SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi, dengan fokus mengidentifikasi kerentanan dan kemungkinan perbaikan pada arsitektur yang ada pada Fungsi Kearsipan.
- b. Menyusun perancangan arsitektur SPBE yang ditargetkan untuk Fungsi Kearsipan di Dinas Arsip Daerah Pemerintah Daerah Kota Cimahi menggunakan TOGAF ADM, dengan tujuan mengoptimalkan Fungsi Kearsipan dan memastikan ketersediaan layanan publik yang terpadu dan sesuai dengan pedoman Arsitektur SPBE yang diatur dalam Perpres No. 132 Tahun 2022.

### **I.4. Batasan Penelitian**

Batasan penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini terbatas pada konteks penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan menggunakan *framework* TOGAF ADM yang disesuaikan dengan arsitektur SPBE sesuai Perpres No.132 Tahun 2022.
- b. Lingkup perancangan arsitektur SPBE hanya difokuskan pada Fungsi Kearsipan di Dinas Arsip Daerah Pemerintah Kota Cimahi.

### **I.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini:

- a. Bagi Pemerintah Kota Cimahi, penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan dengan menyediakan pandangan yang mendalam untuk mengembangkan strategi optimalisasi dan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) khususnya pada Fungsi Kearsipan di Dinas Arsip Daerah Pemerintah Kota Cimahi.
- b. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang penyusunan Enterprise Architecture dan penyelesaian Tugas Akhir.